BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penulisan Skripsi, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kepentingan konsumen yang seringkali diabaikan dan hak konsumen yang berpotensi dilanggar oleh pelaku usaha, menjadi indikasi diperlukan peran negara untuk mengambil andil dalam upaya perlindungan konsumen.

Penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* tidak dibenarkan oleh hukum apalagi Kunci dan STNK telah berpindah tangan ke *debt collector* maka perbuatan ini merupakan tindakan perampasan sebagaimana telah diatur oleh undang-undang hukum pidana pasal 365 diancam dengan pidana 12 Tahun penjara.

Undang-undang no 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia salah satu fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat memacu pembangunan Nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlulah dibentuk ketentuan mengenai undang-undang jaminan fidusia.

Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut tetap dalam pengawasan pemilik benda tersebut. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Fidusia sebagai lembaga jaminan kebendaan.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian yang mengikuti perjanjian pokoknya. fungsi jaminan fidusia sebagai jaminan dalam pemberian kredit adalah sebagai Sarana pengamanan dalam pemberian kredit apabila terjadi wanprestasi oleh konsumen yang diperjanjikan tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan

- 2) Penarikan paksa kendaraan bermotor oleh *debt collector* merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Apalagi kunci dan stnknya telah dipindahtanggankan ke *debt collector* maka tindakan ini merupakan suatu tindakan perampasan sebagaimana terdapat dalam KUHPidana pasal 365 di

ancam dengan pidana kurungan 12 Tahun penjara.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang penulis berikan agar konsumen terhindar dari gugatan ganti rugi pencemaran nama baik oleh pelaku usaha sebagai berikut:

- 1) Mengingat bahwa salah satu tujuan perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian Konsumen untuk melindungi diri, maka diperlukan tindakan nyata yang bertujuan untuk memberdayakan konsumen. Pemberdayaan yang dimaksud adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman konsumn atas hak dan kewajibannya dalam berhubungan dengan pelaku usaha. Upaya ini dapat dilakukan melalui penguluhan, seminar, atau iklan layanan masyarakat yang menghimbau masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Hal ini penting agar konsumen terhindar dari resiko hukum yang timbul karena ketidak tahuan konsumen me ngenai kewajibannya.
- 2) Konsumen dalam menyampaikan pendapat dan keluhannya mewakili kepentingan umum karena pendapat tersebut disampaikan agar tidak terulang pelanggaran oleh pelaku usaha serupa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Maka diperlukan pula amandemen terhadap UUPK mengenai pengecualian bagi konsumen atas gugatan pencemaran nama baik secara perdata maupun tuntutan pidana. Hal ini sebenarnya diarur berdasarkan ps 137 KUHPerdata dan ps 1310 ayat 3 KHUP yang secara garis besar menyatakan, bahwa seseorang tidak dapat dinyatakan pencemaran nama baik apabila tindakan tersebut dilakukannya demi kepentingan umum atau pembelaan diri.
- 3) Penarikan paksa kendaraan bermotor oleh debt collector tidak di benarkan oleh hukum dan apaila kunci dan stnknya di kuasai oleh *debt collector* maka tindakan ini merupaka tindakan perampasan sebagaimana di atur dalam pasal 365 diancam dengan pidana hukuman 12 penjara. Perlindungan hukum bagi konsumen adalah Salah satu upaya pemerintah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat selaku konsumen agar hak haknya terpenuhi